

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN  
TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS**



**Oleh:**

**DITA NOOR SARI**

**NIM. 2220216320058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN  
TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS**



**Oleh:**

**DITA NOOR SARI**

**NIM. 2220216320058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN  
TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**DITA NOOR SARI  
NIM. 2220216320058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2025**

**Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal....**

**Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Menyetujui Koordinator Program Studi  
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 08 Juli 2025

### Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DITA NOOR SARI  
NIM : 2220216320058  
Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan



DITA NOOR SARI  
NIM. 2220216320058

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS**

**Oleh :**

**Dita Noor Sari<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman.**

## **RINGKASAN**

Tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja di kantor notaris menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak normatif pekerja, termasuk dalam lingkungan kerja profesional seperti kantor notaris. Dalam praktiknya, masih banyak pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku, baik karena alasan status kepegawaian, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, maupun lemahnya pengawasan ketenagakerjaan pada sektor jasa profesional. Hal ini menjadi perhatian karena notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi berdasarkan kepercayaan hukum seharusnya juga tunduk pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Kompleksitas hubungan kerja di kantor notaris menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban pemberian THR, khususnya bagi pekerja tidak tetap atau pekerja dalam hubungan kerja informal. Oleh karena itu, kajian terhadap bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum notaris dalam konteks pemberian THR sangat penting untuk memastikan tegaknya hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadaban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas tunjangan hari raya dalam lingkungan kantor notaris serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris sebagai pemberi kerja. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah secara normatif dan yuridis mengenai bagaimana mekanisme hukum dapat menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hak THR pekerja, terutama di sektor jasa hukum yang kerap berada dalam zona abu-abu dalam hal hubungan kerja. Kegunaan penelitian ini tidak hanya bersifat akademik sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan dan profesi hukum, tetapi juga bersifat praktis dalam memberikan masukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Majelis Pengawas Notaris untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap norma perlindungan pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan

---

<sup>1</sup>NIM. 2220216320058

<sup>2</sup>Pembimbing Utama.

perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur hak atas THR dan tanggung jawab pemberi kerja, khususnya notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, keadilan sosial, dan tanggung jawab hukum dalam hubungan kerja. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah sejumlah kasus pelanggaran pembayaran THR oleh kantor notaris yang telah diselesaikan melalui mediasi atau putusan pengadilan hubungan industrial. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja di kantor notaris dalam hal pemberian THR masih lemah karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja di lingkungan profesi hukum seperti notaris. Meskipun notaris tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, implementasinya seringkali tidak berjalan optimal. Status hubungan kerja yang tidak jelas antara notaris dan pekerjanya, terutama untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau tidak ada perjanjian tertulis, menjadi penghambat utama dalam penegakan hak THR. Di sisi lain, tanggung jawab hukum notaris sebagai pemberi kerja mencakup tanggung jawab keperdataan, administratif, dan moral. Notaris wajib memberikan THR kepada pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika tidak dipenuhi, notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga penghentian sementara pelayanan jasa notaris sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih aktif terhadap notaris sebagai pemberi kerja, termasuk revisi terhadap regulasi jabatan notaris agar menyertakan ketentuan eksplisit mengenai kewajiban ketenagakerjaan.

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA DI KANTOR NOTARIS**

**Oleh:**

**Dita Noor Sari<sup>3</sup>, Saprudin<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tunjangan Hari Raya, Kantor Notaris**

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pekerjaannya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum notaris sebagai pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di kantornya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam sektor profesi hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didasarkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil analisis terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pekerja di kantor notaris memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek hubungan kerja, sejauh memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya. Notaris, meskipun berstatus profesi perorangan, tetap dikualifikasikan sebagai pemberi kerja yang tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja seperti THR.

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah kedua, tanggung jawab hukum notaris terhadap pembayaran THR meliputi kewajiban administratif sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 serta konsekuensi sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda, dan penghentian pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, kepastian hukum, dan sosialisasi regulasi kepada kantor-kantor notaris perlu menjadi fokus dalam implementasi perlindungan hak THR.

---

<sup>3</sup>NIM. 2220216320058

<sup>4</sup>Pembimbing Utama.

**THE LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN PAYING RELIGIOUS  
HOLIDAY ALLOWANCE TO THEIR EMPLOYEES**

**By:**

***Dita Noor Sari<sup>5</sup>, Saprudin<sup>6</sup>***

***Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, 104 pages.***

**ABSTRACT**

*Keywords: Legal Protection, Religious Holiday Allowance, Notary Office.*

*This thesis is entitled “The Legal Responsibility of Notaries in Paying Religious Holiday Allowance to Their Employees”. The aim of this research is to analyze and evaluate the legal responsibility of notaries as employers in fulfilling their obligation to pay the Religious Holiday Allowance (THR) to their employees. The study also seeks to contribute theoretically to strengthening labor protection within the professional legal sector. This research employs a normative juridical method, using statute, conceptual, and case approaches based on primary and secondary legal materials.*

*Findings from the first research question show that employees working in notary offices have a legal status as parties to an employment relationship, provided that the elements of work, wage, and authority are fulfilled, as regulated in Law Number 13 of 2003 and its amendments. A notary, despite being an individual legal profession, is legally classified as an employer and is thus bound by labor regulations, including the obligation to fulfill normative employee rights such as THR.*

*Regarding the second research problem, a notary’s legal responsibility for THR payment includes administrative obligations under Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2016 and legal sanctions in cases of violations. These sanctions range from written warnings, monetary fines, to public service suspension. This study concludes that improving regulatory supervision, legal certainty, and public awareness are key to ensuring the just and substantive fulfillment of employees’ THR rights in notary offices.*

---

<sup>5</sup>NIM. 2220216320058

<sup>6</sup>Pembimbing Utama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja di Kantor Notaris" dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengarahan dan dorongan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan, kritik, dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini. Tanpa bimbingan beliau, penulis tidak akan mampu menyusun karya ilmiah ini secara utuh dan komprehensif.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum yang sangat berharga dan menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini.

5. Kedua Orang tua dan Mertua, suami dan anak, serta seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan cinta, doa, semangat, dan dukungan moral yang tidak ternilai sepanjang proses pendidikan hingga selesainya tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, atas kerja sama, motivasi, dan kebersamaan yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan studi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan keilmuan hukum di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja.

Banjarmasin Juni 2025

Penulis,



Dita Noor Sari  
NIM. 2220216320058

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS .....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	42
G. Sistematika Penulisan.....	51
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJA DI KANTOR NOTARIS.....</b>	<b>52</b>
A. Kedudukan Hukum Pekerja di Kantor Notaris dalam Hubungan Kerja.....	52
B. Kewajiban Hukum Notaris terhadap Pembayaran Tunjangan Hari Raya.....	61
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja atas Tunjangan Hari Raya.....	68



<b>BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJANYA.....</b>	<b>81</b>
A. Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris terhadap Tunjangan Hari Raya.....	81
B. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembayaran Tunjangan Hari Raya.....	87
C. Sanksi atas Pelanggaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya oleh Notaris.....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**